

**ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG
NAFKAH ISTRI DALAM IDDAH TALAK *BA'IN***

PROPOSAL

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana (s1)
Pada Konsentrasi Hukum Islam Yang Telah Ditetapkan Oleh
Uin SUSKA Riau.**



Disusun Oleh :

**Yenita Dasopang
10621003702**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu, perceraian dapat terjadi dikarenakan, salahsatunya adanya talak dari suami. Setelah terjadinya perceraian kewajiban nafkah suami belum terputus karena suami masih wajib memberikan nafkah pada masa iddah mantan istrinya, baik dalam talak *raj'i* maupun talak *ba'in* sesuai dengan ketentuan masa iddah yang disyariatkan.

Dalam hal nafkah ini, Imam Syafi'i dan Malik mengatakan bahwa suami tidak berhak memberikan nafkah pada masa *iddah* talak *ba'in* kepada mantan istri, hanya berupa tempat tinggal saja yang harus diberikan, sedangkan imam Hambali berpendapat bahwa suami tidak berhak memberikan tempat tinggal dan nafkah. Namun imam Abu Hanifah berbeda halnya, beliau mengatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada mantan istrinya dalam masa *iddah*-nya.

Perbedaan pendapat di antara Abu Hanifah dengan mayoritas ulama merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuka tabir bagaimana sesungguhnya pemikiran Abu Hanifah tentang nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in*. Disamping itu, untuk menyempurnakan penelitian ini penyusun mencoba menemukan landasan pemikiran Abu Hanifah dan metode yang digunakannya dalam meng-*istinbat*-kan hukum akan masalah nafkah istri ini.

Dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan metode analisis deskriptif, analisis komperetif, dan analisis isi. Penulis gunakan kitab *al-Mabsuth* juz V dan kitab *Ikhtilaf Abu Hanifah Dan Ibn Abi Laila* sebagai sumber primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri yang sedang menjalankan *iddah* talak *ba'in* tetaplah mendapatkan hak-haknya. Karena dalam hal ini Abu Hanifah tidak membedakan. Begitu juga apakah isteri dalam keadaan hamil atau tidak, yaitu nafkah dan tempat tinggal.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar dari perbedaan pendapat diantara Abu Hanifah dengan mayoritas *fukah*' adalah karena Abu Hanifah menggunakan ketentuan umum ayat 6 surat at-Thalak dalam al-Quran, ketentuan ayat ini tidak bisa digugurkan selama masih belum ada pengkhususan yang pasti. Dan pengkhususan ayat ini ternyata tidak dijumpai dalam al-Quran. Sedangkan mayoritas ulama yang menggunakan hadist Fatimah binti Qais, yang dinyatakan dalam hadist tersebut tidak ada nafkah baginya, namun Abu hanifah tidak menggunakan hadist ini karena beliau meragukan kebenaran perwayatannya.

Abu Hanifah tidak memakai hadist tersebut karena Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam mengambil suatu hukum dari hadist, terlebih hadist yang banyak dipertentangkan kebenarannya oleh ulama dalam hal perawi hadist dan matan hadist. Beliau lebih cenderung menggunakan keumuman ayat daripada hadist yang dipertentangkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : BIOGRAFI ABU HANIFAH	13
A. Riwayat Hidup Abu Hanifah	13
B. Pendidikan dan Karya-Karya Abu Hanifah	14
C. Penilaian Ulama Terhadap Abu Hanifah	18
D. Corak Pemikiran Abu Hanifah	23
BAB III : KETENTUAN TENTANG NAFKAH <i>IDDAAH</i> TALAK <i>BA'IN</i> DALAM HUKUM ISLAM	26
A. Nafkah	26
B. Talak	29

C. <i>Iddah</i>	37
D. Ketentuan Nafkah <i>Iddah</i> Talak <i>Ba'in</i> Dalam Ketentuan Hukum Islam	42
BAB IV : PEMBAHASAN	46
A. Nafkah Istri Dalam <i>Iddah</i> Talak <i>Ba'in</i> Menurut Abu Hanifah	46
B. Landasan Pemikiran Dan Metode <i>Ijtihad</i> Hukum Abu Hanifah Tentang Nafkah Istri dalam <i>Iddah</i> Talak <i>Ba'in</i>	50
C. Analisis	59
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu Tuhan menciptakan makhluk hidup di bumi ini berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Yasin ayat 36 yang berbunyi :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(QS. Yasin : 36).¹

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk yang lain, yang hidup bebas mengikuti naluriannya dan berhubungan antara jantan dan betina secara tercela. Oleh sebab itu Allah menetapkan aturan tentang perkawinan yang diperuntukan bagi manusia, dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Aturan-aturan tersebut mengikat seluruh manusia dan tidak boleh berbuat semaunya. Untuk memperoleh perkawinan yang diridhai Allah yang sesuai

¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982), h. 710.

dengan syari'at Islam, maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang yang sudah mempunyai kemampuan, karena dengan perkawinan manusia akan cenderung dan merasa tentram dalam kehidupannya, sehingga akan menimbulkan rasa kasih sayang diantara mereka.

Ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya dan sebaliknya. Sudah menjadi bagian dari sifat manusia bahwa sekalipun dia sudah menikmati segenap prestasi dan derajat keilmuannya namun kelemahannya sebagai manusia tetap lebih menonjol.⁴

Ketika perkawinan tidak mungkin lagi dipertahankan maka lebih baik berpisah secara baik daripada terseret berkepanjangan tak menentu, membuat rumah tangga dan keluarga bagai neraka. Dalam Islam perkawinan merupakan sebuah ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh, namun tidak demikian secara manusiawi ikatan perkawinan itu menjadi masalah untuk dipertahankan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dipertahankan itulah perceraian di izinkan oleh syari'ah

Meskipun Islam memperkenankan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, hak cerai itu hanya dapat digunakan dalam keadaan yang sangat memaksa Nabi SAW telah bersabda :²

² A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 270

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Talak”³

Setelah perceraian keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anaknya itu, suami wajib menafkahnnya bahkan pada saat perceraian. Ada beberapa orang yang mungkin salah memperlakukan istri dan membuat mereka sengsara setelah talak pertama dan ketika ia menjalani masa *iddah*. Hal ini tidak dibolehkan dia harus diberi nafkah yang seimbang sesuai dengan standar hidup si suami. Maka dalam situasi ini masih ada harapan untuk berdamai, jika tidak perceraian tersebut harus dilakukan secara terhormat.

An-Nafaqqaat adalah jamak dari kata *an-nafaqah* yang dalam arti bahasa Indonesia memiliki makna uang, dirham atau sejenisnya dari harta benda.⁴ Sedangkan, ditinjau dari segi *syara*’ artinya memenuhi apa-apa yang ada dari bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu pakaian, makanan, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.⁵

Diwajibkan bagi laki-laki yang memiliki penghasilan cukup dan memiliki istri yang sederajat dengannya atau laki-laki yang miskin memiliki istri dari keluarga kaya dan sebaliknya, diwajibkan memberi nafkah di tengah kadar nafkahnya sesuai dengan adat kebiasaan karena kondisi ini paling layak untuk keduanya.

³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), hadits no.2178, h. 120

⁴ NA.Baiquni, I.A Syawaqi, R.A. Azis, *Kamus Istilah Agama Islam*, (Surabaya : Indah, 1996), h.327

⁵ *Ibid*, 328

Untuk permasalahan nafkah *iddah* bagi seorang isteri, para ulama sependapat bahwa wanita yang dalam masa *iddah* disebabkan terjadinya *thalak raj'i*, maka selain mut'ah, isteri juga berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal ataupun nafkah dari para suaminya, baik ia dalam keadaan hamil atau tidak. Hal ini didasarkan pada interpretasi terhadap ayat al-Qur'an, yaitu pada surat at-Thalak ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ①

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S at-Thalak: 6)⁶

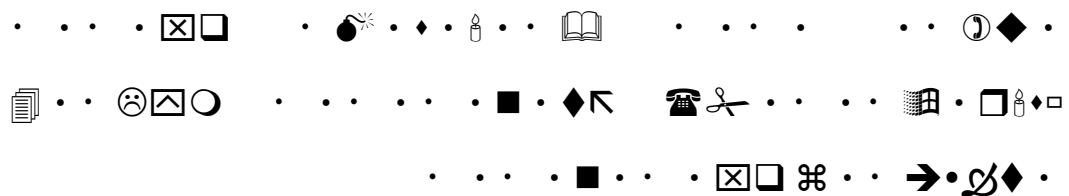
Asumsinya adalah karena isteri yang dithalak *raj'i* dianggap masih di bawah tanggung jawab suami. Karena bila mereka ingin rujuk langsung bisa dilakukan tanpa melalui pernikahan kembali⁷.

⁶ Departemen agama RI, *Op.cit.* h,1123

⁷ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH Apik, 2005), h. 123-124

Jika wanita yang ditalak *ba'in* tidak sedang hamil maka dalam kondisi ini berkembang tiga pendapat di kalangan ahli ilmu mengenai berhak atau tidaknya menerima nafkah dan tempat tinggal.⁸

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, bagi perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam surah at-Thalak ayat 6 :



Artinya : “Dan jika mereka (istri-istri yang di talak itu) sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai melahirkan anaknya”.

(Q.S at-Thalak: 6)⁹

Menurut mereka ketika Allah SWT menyebut tempat tinggal maka dimutlakkan bagi mereka semua perempuan yang dithalak tetapi ketika menyebut nafkah maka diikat dengan keadaan kehamilan. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil, tidak berhak memperoleh nafkah¹⁰.

Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, mengatakan bahwa bagi perempuan yang dithalak *ba'in* dan ia tidak hamil maka perempuan

⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8 (t.tp : Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, tth), h. 152

⁹ Departemen agama RI, *loc.cit*

¹⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, (PT.Bina ilmu: Surabaya, 2003), h 262

tersebut tidak berhak sama sekali atas nafkah, dan tempat tinggal¹¹. Dan ini juga adalah pendapat Ali, Ibnu Abbas dan Jabir. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Atha', Thawus, al-Hasan, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud dimana mereka berdalil dengan hadist Fatimah binti Qais yang disebutkan :

حسن بن علي الحو نى حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن أبى صاحب عن السدى عن البى
فاطمه بنت قيس قالت طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل لى رسول الله صلى عليه وسلم
عن
سكنى و لائفقة

Artinya : Dari Hasan bin Ali al-hilwan telah bercerita kepada kami Yahya bin Adam telah bercerita kepada saya Hasan bin Salih dari Sadyih dari al-Baliy dari Fatimah binti Qais berkata : saya di talak tiga oleh suami saya, maka Rasulullah SAW meniadakan tempat tinggal dan nafkah “ (HR. Muslim)¹²

Akan tetapi lain halnya dengan Abu Hanifah¹³ yang merupakan salah seorang imam yang empat dalam Islam, dan juga sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai *khazanah* intelektual pemikiran hukum Islam khususnya dalam ilmu *fiqh* dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (*ahlu ra'yu*)¹⁴. Beliau berpendapat lain, yaitu mengatakan bahwa istri mendapatkan nafkah dan tempat tinggal¹⁵, pendapat ini berlandaskan pada firman Allah SWT :

¹¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h 179

¹² Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Fikri, tth), h 106

¹³ Abu Hanifah adalah pengasas Mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah (699 Masehi) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar bandar Kufah, Iraq. Beliau hidup di zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah yang kelima. Nama aslinya Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Maah. Lihat Ahmad asy-Syurbasi , *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 12

¹⁴ *Ibid*, h 14

¹⁵ Asy-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, (Libanon : Darul Kitab al-Ilmiyah, 1993), Juz V, h. 201

Abu Hanifah berpendapat bahwa karena perempuan yang ditalak itu dalam masa *iddah*-nya maka ia memperoleh tempat tinggal (selama masa *iddah*) dan tentu saja ia juga memperoleh nafkah sebagaimana perempuan yang dithalak *raj'i*, karena perempuan yang di thalak itu terikat (oleh ketentuan-ketentuan *iddah*) yang berkaitan dengan hak suami yang menthalaknya maka tentu saja ia berhak memperoleh nafkah seperti istri.¹⁷ Dalam hal ini suami masih memiliki hak sebagai suami kepada istrinya, sehingga dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa tergantung pada adanya kesepakatan. Utang ini tidak dapat dihapus kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.¹⁸

Berangkat dari kenyataan inilah penulis tertarik untuk mengangkat pemikiran Abu Hanifah ini sebagai pembahasan dalam karya ilmiah untuk mengkaji secara lebih mendalam terhadap pemikirannya tentang persoalan nafkah

¹⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir ayat-ayat ahkam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003), h

¹⁸ Asy-Syarakhsi, *Op.Cit.* dan lihat juga Abu Yusuf , *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Laila*, (Mesir : Mathba'ah al-Wafa' ,t.th), h. 196

iddah, dengan judul “**Analisis Pemikiran Abu Hanifah Tentang Nafkah Istri Dalam Iddah Thalak Ba’in**”

B. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka masalah yang dibahas dibatasi pada masalah nafkah *iddah* istri yakni istri yang dithalak *ba’in* menurut pemikiran Abu Hanifah

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan dan pembatasan masalah tersebut, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana nafkah *iddah* istri yang dithalak *ba’in* menurut pemikiran Abu Hanifah?
2. Apa landasan pemikiran Abu Hanifah terhadap nafkah istri dalam *iddah* talak *ba’in* dan bagaimana metode *ijtihad* hukum yang dilakukannya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Abu Hanifah tentang nafkah *iddah* istri yang dithalak *ba’in*. Selanjutnya pemikiran ini mempunyai tujuan:

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Abu Hanifah tentang nafkah *iddah* istri yang dithalak *ba'in*
- b. Untuk mengetahui landasan pemikiran Abu Hanifah serta metode *istimbath* hukum yang digunakannya dalam mengistinbatkan hukum terhadap nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sekaligus menawarkan gambaran *paradigma* sekaligus solusi di tengah konstelasi pemikiran *fiqh* (hukum Islam) kontemporer.
- b. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam mengkaji pemikiran *fiqh* (hukum Islam) klasik untuk kemudian dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak yang berkompetensi.
- c. Penelitian bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (s1) pada konsentrasi hukum Islam jurusan Ahwal Syakhsiyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

3. Sumber Data

Adapun dalam hal ini penulis hanya memakai referensi, yaitu :

1. Buah karya asy-Syarakhsi, yaitu ***al-Mabsuth***, Juz V dan
2. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Anshari merupakan salah satu murid terkemuka imam Abu Hanifah, yaitu karyanya, ***Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila***.

Sedangkan literatur-literatur yang termasuk kategori sumber skunder lainnya adalah kitab-kitab yang membahas tentang fikih *munakahat* di antaranya adalah kitab ***al-Umm*** karya imam asy-Syafi'i, ***al-Muwattha'*** oleh imam Malik, kitab ***Fiqh Sunnah*** oleh Sayid Sabiq. dan beberapa referensi fiqh lainnya serta yang berkenaan dengan Abu Hanifah.

Sedangkan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian ini baik yang berupa majalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

4. Metode Analisis Data.

- a. Analisis Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis pergunakan untuk memahami pendapat dan *ijtihad* hukum Abu Hanifah tentang nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in*..

b. Analisis Komperatif

Penelitian komperatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.

Metode ini penulis akan membandingkan pendapat Abu Hanifah dengan pengertian dan dasar hukum *iddah* talak *ba'in* dan pendapat ulama lain tentang hal yang sama.

c. Analisis konten

Suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode yang penulis pergunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan yakni metode analisis konten.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

- Bab I Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi tentang biografi Abu Hanifah yang mencakup tentang riwayat hidupnya, Guru-gurunya dan karya-karya tulisnya dan corak pemikiran Abu Hanifah.
- Bab III Gambaran umum tentang nafkah *iddah* istri yang ditalak dikalangan ulama yakni pengertian *iddah*, dasar hukum *iddah*, macam-macam *iddah* dan hak serta kewajiban suami istri dalam masa *iddah*.
- Bab IV Berupa penelitian terhadap penulisan skripsi ini terhadap pemikiran Abu Hanifah tentang nafkah *iddah* istri yang ditalak, landasan pemikiran beliau akan masalah ini dan metode yang digunakannya dalam meng-*ijtihad*-kan hukum serta analisa penulis terhadap hukum Islam dan pemikiran Abu Hanifah tentang nafkah *iddah* istri yang ditalak *ba'in*
- Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI ABU HANIFAH

A. Riwayat Hidup Abu Hanifah

Nama asli Abu Hanifah ialah an-Numaan bin Zauthi al-Taimi al-Kufi, kepala suku dari Bani Taimi bin Tsa'labah. Dia dilahirkan pada tahun 80 hijiriah di Kufah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan¹. Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Ada beberapa pendapat ahli sejarah tentang bapaknya. Di antaranya mengatakan bahwa dia berasal dari Anba dan ia pernah tinggal di Tamuz dan Nisa. Bapak Abu Hanifah seorang pedagang beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah. Ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Ia pernah membawa ibunya ke majelis-majelis atau keperhimpunan ilmu pengetahuan².

Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama-agama dan isme-isme. Waktu terjadi penggantian pemerintahan Umayyah pada Raja Adhuh timbullah fitnah dan kekacauan dalam negeri. Semua kaum (Nasionalis) Arab kelihatan dengan nyata dan begitu juga unsur-unsur yang anti pada bangsa asin.

¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008), h 169

² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazha*, (Jakarta : Amzah, 2008), h 13

Tekanan-tekanan yang kuat terjadi pada pemerintah, ketika masa pemerintahan Abasiyah ia dapat mengikuti perselisihan antara mereka yang pro-Abasiyah dan yang pro-Umayyah. Ia hidup dalam masyarakat yang kacau balau disebabkan penduduk waktu itu terdiri berbagai suku bangsa seperti Arab asing, Persia dan Romawi.

Sepuluh tahun sepeninggalan gurunya, yakni pada tahun 150 H, imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di sana dan di tempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abudullah bin Abbas ra.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmu nya, ahli *zuhud*, sangat tahwadhu, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik pada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran menjadi halim (Qadhi) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada umur 70 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Khizan. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama jami' Abu Hanifah. Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak³.

³ Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2010), cet ke-25, h. 27

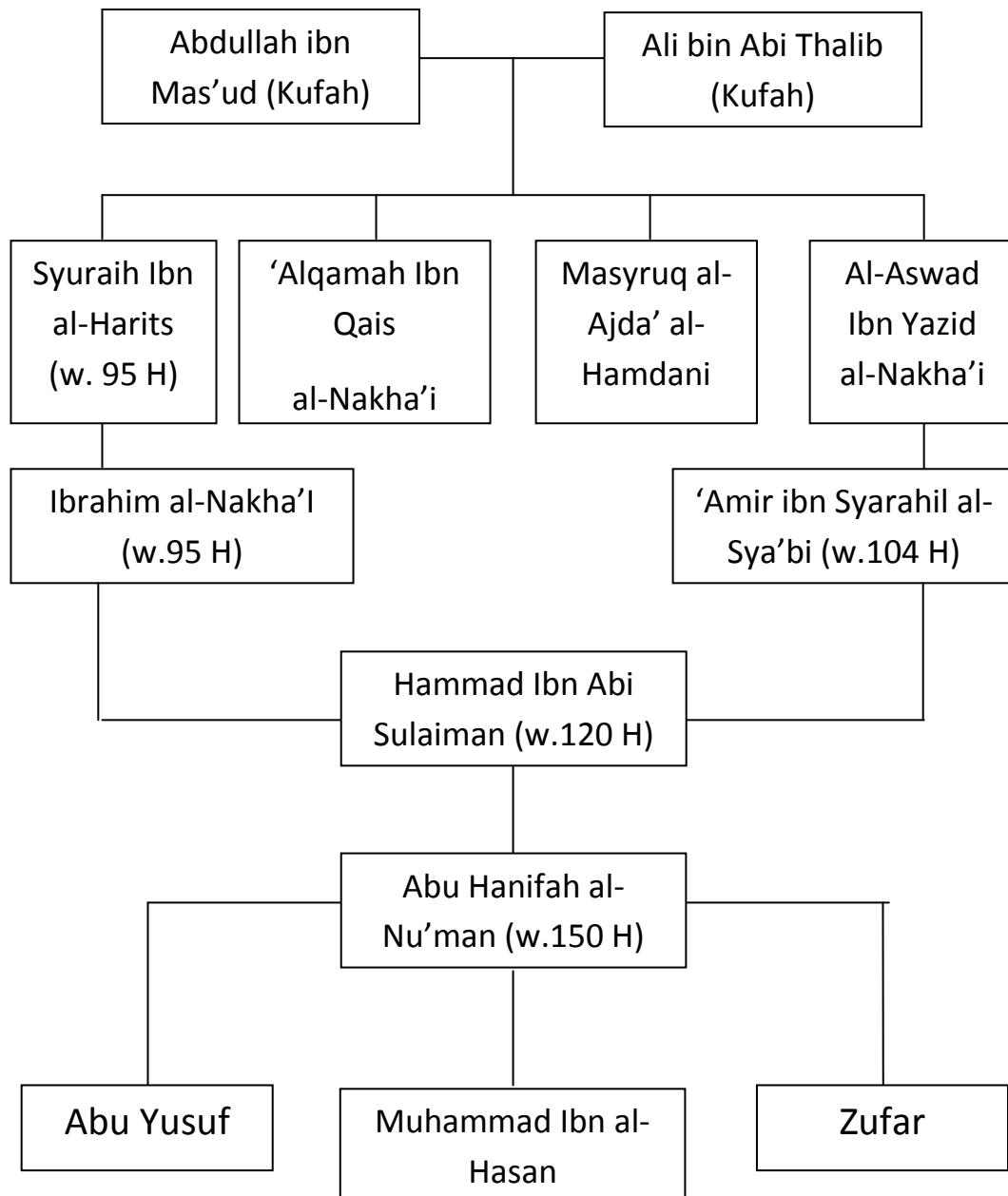
B. Pendidikan dan Kaya- Karya Abu Hanifah

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fikih ia berniat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.

Di samping mempelajari ilmu fikih beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain : *Al-Fiqhul Akbar*, *al-Rad Ala al-Qudariah* dan *al-Alim al – Muta'allim*. Beliau berpaling untuk memperdalam dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama al-Sya'ab.

Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, atas anjuran al-Sya'bi ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Beliau termasuk generasi Islam ke tiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup yakni Anas ibn Malik di Bashrah, Abd Allah ibn Ubai di Kufah, Saahi ibn Sa'd al-Sa'id di Madinah dan Abu al-Thufaail 'Amir ibn Wa'ilah

Adapun guru-guru dan murid-murid Abu Hanifah adalah⁴ :



⁴ Juhaya S. Praja, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), cet ke-3, h. 71

Jalan yang ditempuh oleh Abu Hanifah dalam menyikapi Al-Qur'an adalah sama dengan jalan para imam mazhab yang lain. Jika mereka berbeda pendapat tentang suatu yang berkenaan Al-Qur'an, maka perselisihan itu hanyalah terbatas pada kandungan maknanya dan cara pengambilan kesimpulan hukumnya⁵. Adapun dalam penerimaan hadist Abu Hanifah sangat hati-hati dia meneliti semua *rijal* hadist sampai yakin benar hadist itu shahih. Dia tidak menerima kabar dari Rasulullah SAW, kecuali diriwayatkan oleh jama'ah dari jama'ah yang lain atau *khabr* yang disepakati kesahihannya oleh para fuqaha untuk diamalkan.

Dia berpendapat bahwa penggunaan akal boleh dilakukan manakala dalam suatu masalah muncul dua pendapat atau lebih dari para sahabat. Kita memilih yang paling sesuai dan paling dekat dengan kaidah-kaidah umum dan tidak memperpanjang dengan pendapat tabi'in kecuali pendapat itu bisa diterima oleh akal.. dia berkata “ aku mengambil dalil dari Kitabullah jika aku menemukan dalil darinya. Jika aku tidak menemukannya, aku akan mengambilnya dari sunnah Rasulullah dan riwayat yang sah yang menyebar di kalangan orang yang bisa dipercaya (*tsiqat*). Jika aku pun tidak menemukannya dari kitabullah atau sunnah Rasulullah aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan kutinggalkan pendapat para sahabat yang tidak aku kehendaki, setelah itu aku tidak akan meninggalkan pendapat mereka dan tidak beralih pendapat yang lain. Aku berhak melakukan ijtihad seperti mereka”.

⁵Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 93

C. Penilaian Para Ulama Terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, diantaranya:

1. Al-Futhail bin Iyadh berkata, “abu Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewara’annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun di malam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa.”⁶
2. Abdullah ibnul Mubarak berkata, “Kalaupun Allah subhanahu wa ta’ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa”. Dan beliau juga berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang paling *faqih*”. Dan beliau juga pernah berkata, “Aku berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, ‘Wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan *ghibah* adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat *ghibah* meskipun kepada musuhnya, kemudian beliau menimpali ‘Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebbaikannya dengan perbuatan *ghibah*’.” Beliau juga berkata, “Aku datang ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling *wara*’ di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. Beliau juga berkata, “Apabila *atsar* telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang

⁶ Syaikh Ahmad farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008), h 170

paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah ... dan dia orang yang paling *faqih* dari ketiganya”.

3. Al-Qodhi Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan *fiqih* hadits dari Abu Hanifah”.
4. Imam Syafii berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah *fiqih* hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”
5. Fudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan *wara'*-nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”. Qois bin Rabi' juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.
6. Yahya bin Sa'id al-Qothan berkata, “Kami tidak mendustakan Allah swt, tidaklah kami mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah, dan sungguh banyak mengambil pendapatnya”.
7. Hafsh bin Ghiyats berkata, “Pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqih lebih mendalam dari pada syair, dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya”.
8. Al-Khuroibi berkata, “Tidaklah orang itu mencela Abu Hanifah melainkan dia itu orang yang pendengki atau orang yang jahil”.

9. Sufyan bin Uyainah berkata, “Semoga Allah merahmati Abu Hanifah karena dia adalah termasuk orang yang menjaga shalatnya (banyak melakukan shalat)”.

Beberapa penilaian negatif yang ditujukan kepada Abu Hanifah Abu Hanifah selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditujukan kepada beliau, diantaranya :

1. Imam Muslim bin Hajaj berkata, “Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit shahibur ro'yi mudhtharib dalam hadits, tidak banyak hadits shahihnya”.
2. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu'aib An-Nasai berkata, “Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya”.
3. Abdullah ibnul Mubarak berkata, “Abu Hanifah orang yang miskin di dalam hadits”.
4. Sebagian *ahlul ilmi* memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah *murji'ah* dalam memahami masalah iman. Yaitu pernyataan bahwa iman itu keyakinan yang *adal* dalam hati dan diucapkan dengan lisan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.

Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari hakekat iman, akan tetapi dia termasuk dari *sya'air* iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy'ariyyah, Abu Manshur Al-Maturidi ... dan menyelisihi pendapat ini adalah Ahlu Hadits ... dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah membenaran di dalam hati dan penetapan dengan lisan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksudkan

dengan “tidak bertambah dan berkurang” adalah jumlah dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat, dan hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan yang samar, dan yang semisalnya ...

Dan dinukil pula oleh para sahabatnya, mereka menyebutkan bahwa Abu Hanifah berkata, ‘Orang yang terjerumus dalam dosa besar maka urusannya diserahkan kepada Allah’, sebagaimana yang termaktub dalam kitab “Fiqhul Akbar” karya Abu Hanifah, “Kami tidak mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak membahayakan dosa-dosanya terhadap keimanannya, dan kami juga tidak mengatakan pelaku dosa besar itu masuk neraka dan kekal di neraka meskipun dia itu orang yang fasiq, ... akan tetapi kami mengatakan bahwa barangsiapa beramal kebaikan dengan memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya, tidak membatalkannya dengan kekufuran dan murtad sampai dia meninggal maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya, bahkan insya Allah akan menerimanya; dan orang yang berbuat kemaksiatan selain syirik dan kekufuran meskipun dia belum bertaubat sampai dia meninggal dalam keadaan beriman, maka dia berada dibawah kehendak Allah, kalau Dia menghendaki maka akan mengadzabnya dan kalau tidak maka akan mengampuninya.”

5. Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat Al-Qur'an itu makhluk. Padahal telah dinukil dari beliau bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ini merupakan pendapat *ahlul haq* ..., coba lihatlah

ke kitab beliau *Fiqhul Akbar* dan *Aqidah Thahawiyah* ..., dan penisbatan pendapat Al-Qur'an itu dalam makhluk kepada Abu Hanifah merupakan kedustaan". Dan di sana masih banyak lagi bentuk-bentuk penilaian negatif dan celaan yang diberikan kepada beliau, hal ini bisa dibaca dalam kitab *Tarikh Baghdad* juz 13 dan juga kitab *al-Jarh wa at-Ta'dil* Juz 8 hal 450.

Dan kalian akan mengetahui riwayat-riwayat yang banyak tentang cacian yang ditujukan kepada Abu Hanifah dalam *Tarikh Baghdad* dan sungguh kami telah meneliti semua riwayat-riwayat tersebut, ternyata riwayat-riwayat tersebut lemah dalam sanadnya dan mudhtharib dalam maknanya. Tidak diragukan lagi bahwa merupakan cela, aib untuk ber-*ashabiyyah madzhabiyyah*, ... dan betapa banyak daripada imam yang agung, alim yang cerdas mereka bersikap *inshaf* (pertengahan) secara *haqiqi*.

Dan apabila kalian menghendaki untuk mengetahui kedudukan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan celaan terhadap Abu Hanifah maka bacalah kitab *al-Intiqo'* karya Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr, *Jami'ul Masanid* karya al-Khawaruzumi dan *Tadzkiratul Hufazh* karya Imam Adz-Dzahabi. Ibnu Abdil Barr berkata, "Banyak dari Ahlul Hadits yakni yang menukil tentang Abu Hanifah dari al-Khatib (*Tarikh Baghdad*) melampaui batas dalam mencela Abu Hanifah, maka hal seperti itu sungguh dia menolak banyak pengkhabaran tentang Abu Hanifah dari orang-orang yang adil"

D. Corak Pemikiran Abu Hanifah

Abu Hanifah banyak mengemukakan masalah-masalah baru sehingga beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi, beliau juga menerangkan hukum yang kemungkinan terjadi.

Di dalam kitab al-*Intiqa* disebutkan bahwa pegangan dalam pemikiran yang diambil oleh Abu Hanifah ialah

كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة و فرار من القبح . والنظر في معاملات الناس وماستقاموا
عليه امورهم يمضي الامر على يمضي على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على
الاستحسان ما دام يمضي له فإذا لم يمضي له رجع إلى مايتعامل المسلمون . وكان يوصل
الحديث المعروف الذي قد اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس . ثابتاً ثم يرجع إلى
الاستحسان ايهما كان أوفق رجع إليه

Artinya : Pendirian abu Hanifah, ialah mengambil yang kepercayaan dan lri dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka, beliau menjalankan urusan atas *qiyas*. Apabila *qiyas* tidak baik dilakukan, beliau melakukannya atas *ihtisan* selama dapat di lakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan, beliau pun kembali kepada *uruf* masyarakat. Dan me-*wasal*-kan (mengamalkan) hadist yang telah terkenal hadist yang di *ijma'i* ulama. Kemudian beliau mengisyaratkan sesuatu kepada hadist itu, selama *qiyas* masih dapat dilakukan. Kemudian beliau kembali kepada istihsan mana keduanya yang paling tepat kembalilah beliau kepadanya.⁷

Dalam nash ini dapat diambil tanggapan bahwa Abu Hanifah memakai dalil dalam menentukan usatu hukum yakni :

- Al-qur'an

⁷ Hasbi ash-shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973) h. 132

- As-sunnah
- Ijma' dan fatwa sahabat

Di dalam hal yang diperselisihkan Abu Hanifah mengambil salah satunya, yaitu yang lebih dapat diterimanya atau yang lebih dekat kepada apa yang diistimbatkan dari al-kitab dan as-sunnah. Apabila tak ada nash dan tak ada pendapat para sahabat, Abu Hanifah mempergunakan qiyas. Jika di pandang bahwa menggunakan kurang tepat di pergunakan *ih̥tisan*. Jika tidak dapat di pergunakan *ih̥tisan* diambulkan '*urf*.

Abu Hanifah mengikuti pendapat para fuqaha negerinya, apabila para fuqaha itu telah sependapat. Tegas dalam memegang *ijma*; para fuqaha di negerinya. Jelasnya dalil fiqih yang di gunakan Abu Hanifah ialah :

- Al- Qur'an
- As-sunnah
- *Ahwalus Shahabah*
- *Al- ijma*
- *Al-qiyas*
- *Al-ih̥tisan*
- . *Al- 'urf*

Ada banyak hadist yang disampaikan kepadanya kemudian di tolak oleh Abu Hanifah, misalnya :

- a. Abu Hanifah menolak hadist yang maksudnya, Nabi mengadakan undian terhadap istri-istrinya bila hendak bepergian. Alasannya undian termasuk perjudian.

- b. Ibn abi Syaibah dalam sebuah *Mushafnya* meriwayatkan hadist bahwa Nabi merajam pria dan wanita yahudi karena zina. Lalu disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak hadist itu karena tidak percaya bahwa rajam di berlakukan kepada mereka. Alasannya bahwa untuk di rajam ada dua syarat, Islam dan *muhsan/mushsahnah*.

Dari beberapa contoh ini dapat di simpulkan bahwa tidak sembarangan hadist yang dapat menyakinkan abu Hanifah sebagai yang berasal dari Nabi. Imam abu Hanifah adalah Imam *ahlu ra'yu* dalam menghadapi nash al-Qur'an dan as-sunnah. Ia berusaha menangkap pesan di balik nash. Maka ia dikenal ahli di bidang *ta'lil al- ahkam* dan *qiyas*. Dari pendiriannya itu ia memunculkan teori istihsan.

Rasional keputusan fikihnya dapat di lihat dari beberapa contoh yakni Abu Hanifah pernah di Tanya “ apa pendapatmu minum dengan wadah gelas yang di sebagian sisinya terdapat perak ? ia menjawab, “ tidak mengapa, di Tanya lagi “ bukankah minum dengan wadah emas dan perak di larang Nabi ? ia menjawab “ apa pendapat anda tentang melewati saluran air dalam keadaan haus kemudian minum air itu dengan menciduknya dengan tanganmu yang salah satu jarinya ada cincin emas? Penanya menjawab “tidak mengapa” begitulah kata Abu Hanifah⁸.

⁸ Muh. Zuhri, *Hukum islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h 100

BAB III












KETENTUAN TENTANG NAFKAH *IDDAH* TALAK *BA'IN* DALAM HUKUM ISLAM






A. Nafkah








I. Pengertian dan dasar hukum memberi nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab *infaq*, yang secara bahasa berarti biaya, belanja atau pengeluaran uang.¹ Secara istilah, nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya.² Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafkah diartikan biaya untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.³

Seorang suami baligh itu wajib hukumnya memberi nafkah, baik dia sudah mencampuri isterinya atau belum, kecuali bila *nusyuz*.⁴ Dasar hukum nafkah adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

• •   • ⑩ • • • •   •    •  •    • •

• • • •   • •  • •  • • • • • •  • ⑥

• • • • ② •    •    • 

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".⁵

¹ N.A.Baiquni ,dkk, *Kamus Istilah agama Islam*, (Surabaya : Indah,1996) h.341.

² *Ibid*, 342

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 770

⁴ Muhammad bin Ahmad, *Fthurrahi, alafiqh al-Imam Malik al-adallh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1979), Juz II, h 93

⁵ Depag RI, *Op.cit* h. 57

Kewajiban memberi nafkah dalam Islam diakibatkan karena tiga hal, yaitu akibat hubungan perkawinan, kekerabatan, dan kepemilikan seorang pemilik. Dan kewajiban nafkah ini dikenakan atas 6 (enam) perkara. Yaitu kewajiban atas memberi makanan pokok, lauk pauk, perabotan atau peralatan, tempat tinggal, dan beberapa kebutuhan yang khusus. Namun dalam pembahasan bab ini hanya dikonsentrasikan pada hukum nafkah terhadap isteri. Jika seorang suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap isteri, baik kewajiban nafkah, tempat tinggal, atau lainnya, maka suami diberi tenggang selama 2 bulan untuk memenuhinya.

II. Gugurnya kewajiban memberi nafkah

Kewajiban memberi nafkah terhadap isteri bisa menjadi gugur apabila isteri melakukan hal-hal tertentu. Di antaranya adalah :

a. Isteri nusyuz

Nusyuz dalam permasalahan ini bisa diartikan isteri tidak mau digauli, atau keluar rumah tanpa seijin suami.

b. Masih kecil

Masih kecil bisa diartikan isteri dinikahi saat masih kecil, atau yang menikahi masih kecil namun isteri sudah dewasa. Jika isteri masih kecil dinikahi oleh laki-laki yang sudah dewasa, maka dia wajib memberi nafkah. Namun apabila isteri sudah dewasa dan yang laki-laki masih kecil, maka ada dua pendapat, yaitu wajib dan tidak wajib. Mengapa masih wajib, padahal suami masih kecil?. Ini disebabkan masih ada pihak lain yang bisa

menanggung kewajiban suami yang masih kecil tersebut. Akan tetapi hukum wajib ini bisa tidak wajib apabila selain kecil, suami juga masih bodoh.

c. Isteri melakukan ibadah ihram tanpa seijin suami.

Karena hal ini sudah masuk kategori *nusyuz*.

d. *Iddah* talak *ba'in*.

Namun masalah ini masih menjadi perdebatan. Dan inilah yang menjadi konsentrasi kajian ini.

Ketentuan tentang gugurnya kewajiban nafkah dalam KHI cukup sederhana, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 80 poin 7 yang berbunyi :
"kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud, gugur apabila *nusyuz*".⁶

III. Kadar nafkah

Kadar nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri itu berbeda-beda ukurannya. Dalam arti, banyaknya nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam mazhab Syafi'iyah, ukuran kadar nafkah seorang isteri dinisbatkan kepada kadar *kafarat*. Hal ini disebabkan karena Allah hanya mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah, tanpa menjelaskan secara pasti berapa ukurannya. Lihat firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 6 :

• ❁ • • ☒ ○ • • • • • • • • • • ☞ ☐ ☒
• • • • • ⑨ • II • • • • • • • • • • ☞ • ♦ • ☒ ☞

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu

⁶ Arkola, *Op.cit*, h. 205

Walaupun secara spesifik kadar nafkah tidak disebutkan dalam al-Quran, bukan berarti kadar nafkah itu tidak beraturan. Selain sesuai dengan kemampuan suami, hendaknya juga tidak boleh berlebihan. Dan dalam permasalahan ini, KHI sendiri tidak menyebutkan secara spesifik berapa kadar nafkah terhadap isteri, namun KHI hanya menjelaskan bahwa nafkah terhadap isteri berdasarkan kemampuan suami, sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 poin b.

B. Talak

1. Pengertian, hukum dan dasar hukum talak

Talak berasal dari bahasa Arab at-Thalak yang bermakna cerai nikah, bercerai.⁷

Abdul Adzhim dalam kitabnya *al-Wajiz* mengatakan bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak ini merupakan sesuatu yang disyariatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah al-Quran dan Hadist⁸.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Al-sunnah* memberi pengertian talak yaitu melepaskan perkawinan dan mengakhiri ikatan suami istri (hubungan suami istri)".⁹ Sedangkan Abu Zakaria al-Anshori dalam kitabnya *Fathul Al-Wahab*

⁷ Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1973), h. 239

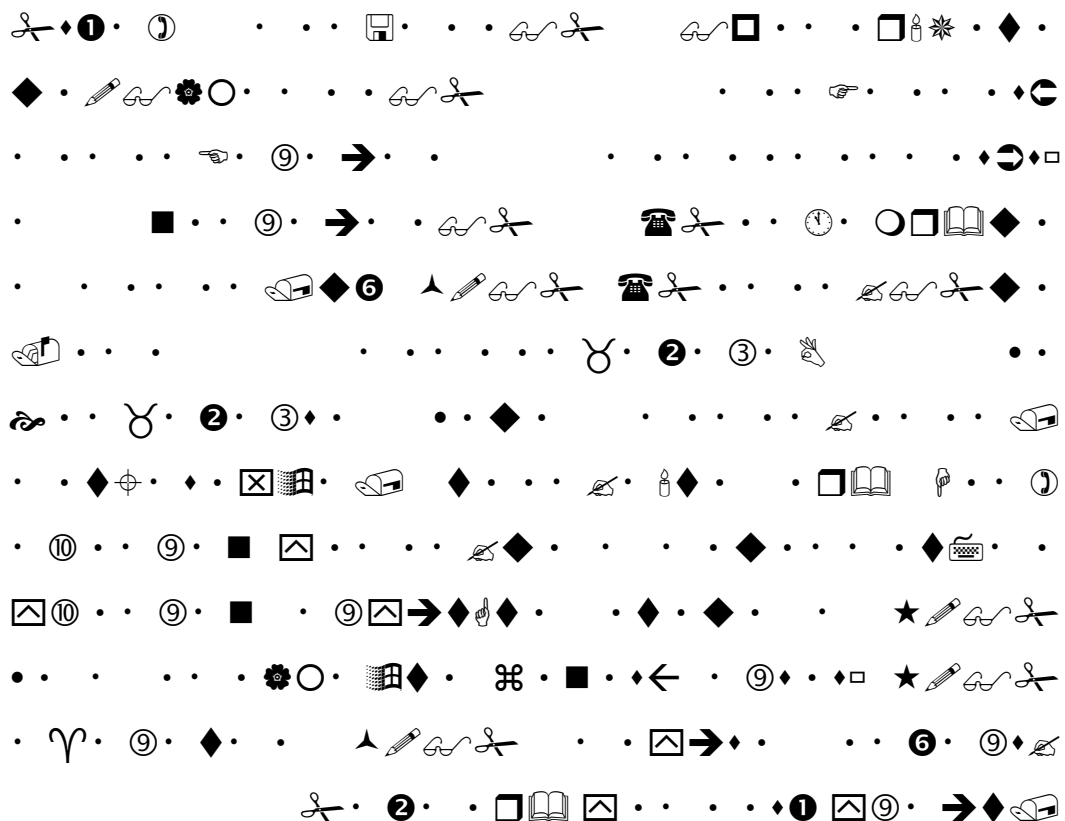
⁸ Abdul Azhim, *Terjemahan al-Wajiz*, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008), h 627

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , terj. M. Thalib,(Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980) Juz 8, hal.

mengartikan talak adalah melepas tali akad nikah dengan (menggunakan) kata talak dan semacamnya".¹⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak dan semacamnya. Disyariatkannya talak dalam Islam sebagai jalan keluar bagi pasangan suami istri yang telah mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga, antara lain telah digariskan oleh Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijma dan secara logika juga bisa diterima.

Dalam surat At-Talaq ayat 1 menjelaskan:



¹⁰ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath Al-Wahab*, Juz II, Semarang, Toha Putra, t.th, hal. 72

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir *iddahnya*, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka hanya untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-kitab dan al-hikmah. Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu" (Qs. Al-Baqarah: 231).¹²

Kemudian dasar hukum talak dapat ditemui dalam hadits Rasulullah yang berbunyi

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talak" (HR.Imam Abu Dawud dan Ibnu Majjah).¹³

Talak merupakan suatu peristiwa hukum yang telah berjalan lama, talak sudah dikenal lama sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Talak dikenal serta terjadi di tengah masyarakat luar hingga sekarang, keberadaan talak masih tetap diakui eksistensinya dan tidak ada pengingkaran terhadapnya.¹⁴

Pada dasarnya, hukum talak tidak diperbolehkan jika hanya untuk memenuhi nafsu dunia, namun akan menjadi mubah jika karena sebuah hajat yang murni.¹⁵

¹² *Ibid*, hal. 29

¹³ Iman Abi Fadhl bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram*, (Beirut : Daar Al-Fikr, t.th), h. 225

¹⁴ Abd al-Qodir Manzhor, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta : zaman, 2009) h 44

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hal.8

Hukum talak bisa saja menjadi sunah apabila terdapat kemadlaratan. Juga bisa saja wajib dan haram.¹⁶

Adapun hukumnya menjadi wajib bila mana terjadi pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, dan pihak ketiga yang menjadi juru damai sudah memutuskan untuk menceraikan.¹⁷ Sedangkan dihukumi *bid'i* ketika talak dijatuhkan ketika isteri sedang haid. Hukum disunnahkan ketika isteri menyepelekan (tidak mau melaksanakan) tugasnya. Dan menjadi makruh jika dilaksanakan ketika rumah tangga dalam keadaan normal.

Mengenai rukun-rukun talak adalah ucapan, tempat, kemampuan, kesengajaan, dan orang yang ditalak. Sedangkan syarat-syarat talak adalah hendaknya suami tersebut dewasa, berakal, dan sadar (apa yang dilakukan dan diucapkan). Syarat untuk isteri, adalah wanita tersebut merupakan orang yang sudah dinikahi. Untuk rukun dan syarat seperti ini, KHI tidak mengatur. KHI hanya menjelaskan alasan-alasan yang memperbolehkan terjadinya perceraian. Hal ini tentulah wajar, karena perceraian yang diatur KHI haruslah di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim tidak bisa mendamaikan¹⁸

2. Macam-macam talak

- a. Ditinjau dari waktu dijatuhkan, talak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

¹⁶ *Ibid*, h. 9

¹⁷ Salah satu penyebab hukum wajib menceraikan isteri adalah ketika seorang suami tidak mampu memenuhi hak-hak isteri. Lihat, Abdurrahman Jaziriy, al-, *Kitab Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Dar al-Fikr, 1996, h. 261.

¹⁸ Arkola, *Op.cit*, h. 216.

- 1) *Talak ahsan* : yaitu talak yang dijatuhkan satu kali ketika isteri sedang suci dan tidak mengumpulinya (*jima*') serta meninggalkannya (tidak menggaulinya) sampai habis waktu *iddahnya*.
- 2) *Talak hasan*, yaitu talak dengan redaksi tiga kali dalam waktu tiga kali suci
- 3) *Talak bid'i*, yaitu talak yang pengucapan redaksinya dua atau tiga kali dalam satu tempo, mentalak ketika isteri sedang haid, dan atau mentalak ketika isteri sedang suci namun talaknya mengakibatkan tidak adanya peluang untuk rujuk. Akan tetapi mentalak isteri yang belum dicampuri ketika waktu haid, tidaklah termasuk *talak bid'i*.¹⁹ .

Selain pengelompokan di atas, ada juga yang hanya mengelompokkan menjadi 2 saja, yaitu *bid'i* dan *sunni*. Talak *sunni* diartikan mentalak isteri ketika sedang suci dan tidak menggaulinya (pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian talak *ahsan* di atas). Sedangkan talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan ketika isteri sedang haid.

b. Ditinjau dari redaksi talaknya, talak dibedakan menjadi :

- 1) Talak *sarikh*, yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas. Sehingga tidak dimungkinkan mengandung arti lain.
- 2) Talak *kinayah*, yaitu talak yang menggunakan redaksi samara atau sindiran. namun redaksi dengan *kinayah* ini juga harus jelas, dalam arti sindiran ini sudah menjadi kebiasaan dan berlaku di lingkungan masyarakat setempat.

¹⁹ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT. Raja grafindo persada, 2009) h, 348

Redaksi talak *kinayah* sendiri bisa dibedakan menjadi 2, yaitu *kinayah* yang jelas dan *kinayah* yang samar. Redaksi jelas seperti "kamu akan sendiri. Sedangkan redaksi samar seperti "keluarlah" atau "pergilah".

c. Ditinjau dari segi ada tidaknya kemungkinan bagi suami untuk merujuknya, maka *iddah* dapat dibagi menjadi 2. Yaitu :²⁰

1) Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang pernah digauli, yang dalam rujuknya tidak perlu menggunakan akad nikah baru.

2) Talak *ba'in*, yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri.

Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua yakni:

a) Talak *ba'in Shugra* ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah kepada istri bekas istrinya²¹. Yang termasuk dalam talak *bain shugra* ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhu* (setubuh) dan *khulu*.

Hukum talak *ba'in shugra*

- Hilangnya ikatan nikah antara suami istri
- Hilangnya hak begaul bagi suami istri termasuk berkhulwat (menyendiri berdua-duaan)
- Masing-masing tidak mewarisi manakala meninggal
- Bekas istri dalam masa *iddah*, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
- Rujuk dengan akad dan mahar yang baru

²⁰ Abdul Azhim, *Op.cit*, h 629

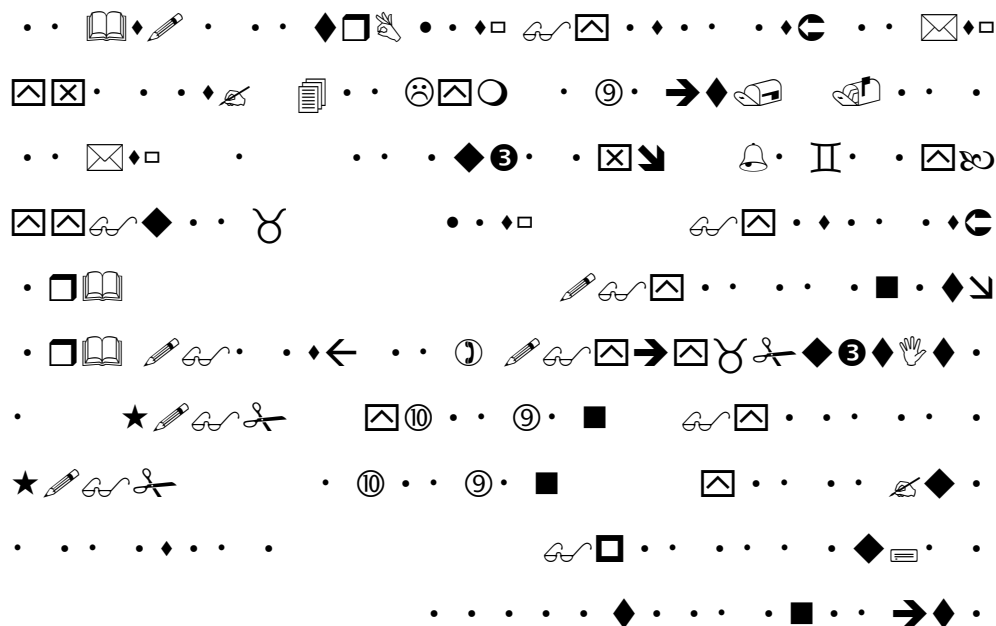
²¹ M.A. Thami, *Op.cit*. h 245

- b) Talak bain kubra ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah dan sesudahnya.

Hukum talak bain Kubro yakni :

- Sama dengan hukum talak bain *shugra* 1,2,3 dan 4
- Suami haram kawin lagi dengan bekas istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.

Allah SWT berfirman surat al-Baqarah ayat 230 :



Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

Secara garis besar, ketentuan pembagian talak tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam KHI. Hanya KHI tidak mengatur tentang redaksi sebagaimana yang dijelaskan di atas. Pembagian jenis talak dalam KHI diatur dalam pasal 118-122.

III. Redaksi Talak

Dalam kajian fikih klasik, redaksi talak juga mempengaruhi hukum talak itu sendiri. Dan ini sendiri juga masih menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik tentang bagaimanakah redaksi talak yang bisa dihukumi talak jatuh atau tidak. Golongan Imamiyyah mengatakan bahwa talak dianggap tidak sah kecuali dengan redaksi khusus. Seperti ucapan "engkau adalah orang yang diceraikan". Jika hanya menyebutkan talak tanpa menyebutkan objek (isteri), maka hukumnya tidak sah. Ucapan ini harus diucapkan di depan 2 orang saksi laki-laki yang adil.²² Sehingga bisa disimpulkan bahwa golongan Imamiyyah sangat membatasi ruang lingkup talak sedemikian sempitnya. Untuk golongan mazhab lain, redaksi talak boleh dengan redaksi apapun dan dalam bentuk apapun (tulisan atau lisan), asal ada niat untuk talak. Walaupun begitu, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan talak tidak sah. Redaksi talak tidak boleh disandarkan kepada masa lampau. Ucapan "aku telah mentalakmu kemarin" atau sebelum aku menikahimu, aku telah mentalakmu", ini tidak dianggap jatuh talaknya. Selain itu juga tidak boleh disandarkan pada suatu

²² Jawad Mugniyyah, *Op.cit*, h. 221

sifat yang tidak ditemui atau sesuatu yang mustahil terjadinya. Seperti ucapan "aku akan mentalakmu jika langit runtuh".

Begitu juga dengan mazhab Malikiyyah. Malikiyyah memperbolehkan menggantungkan dengan sifat. Dan jika sifat itu sudah datang, maka secara otomatis jatuhlah talaknya. Jika ada seseorang yang lupa apakah dia sudah mentalak isteri atau belum, bagaimanakah hukumnya?. Menurut Mahammil, orang tersebut dihukumi belum mengucapkan. Karena hukum asal talaknya adalah tidak ada (tetapnya perkawinan).

Dan apabila dia lupa berapa kali mengucapkan talak, maka yang dianggap adalah bilangan yang lebih sedikit.²³ Namun ini semua merupakan kajian fikih klasik, dan di Indonesia sendiri redaksi talak tidak berperan begitu signifikan. Karena talak di Indonesia hanya dianggap sah jika diucapkan di depan hakim Pengadilan Agama. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa KHI tidaklah mengatur redaksi talak.

C. Iddah

I. Pengertian dan dasar hukum *iddah*

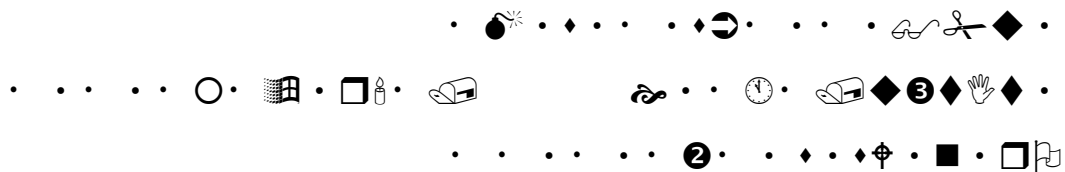
Kata *iddah* berasal dari bahasa arab yang asal katanya adalah *adda-ya'uddu- 'iddatan* dan jamaknya adalah kata '*iddad* yang secara bahasa berarti menghitung atau hitungan sesuatu.²⁴ Secara istilah, *iddah* adalah menahan diri yang dikenakan terhadap isteri ketika hilang akad nikahnya dan sudah diketahui dengan pasti bahwa dia sudah dikumpuli suaminya, atau bisa juga

²³ Syaikh Muhammad al- Usaimin, *Fikih Wanita* (Jakarta : Mutiara Faza, 2009) h, 656

²⁴ Sayyid Sabiq, Jilid 8 *Op.cit.* h 20

disebabkan kematian suami.²⁵ *Iddah* juga bisa diartikan sebagai masa isteri untuk menahan diri untuk mengetahui kebersihan rahimnya, serta untuk menghormati suaminya.²⁶ Dan landasan hitungan *iddah* adalah *quru'*, bulan, dan kehamilan.²⁷

Adapun dasar disyariatkan *iddah* adalah Surat al-Baqarah ayat 228 :



Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'".²⁸

II. Macam-macam *iddah*

Dalam Islam, *iddah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *iddah* kematian dan *iddah* talak (suami masih hidup).

a. *Iddah* kematian

Seorang isteri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa *iddah*.

Adapun perincian *iddahnya* adalah sebagai berikut :

1) Bagi isteri yang tidak sedang mengandung *iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari.

Ketentuan ini tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 234.²⁹

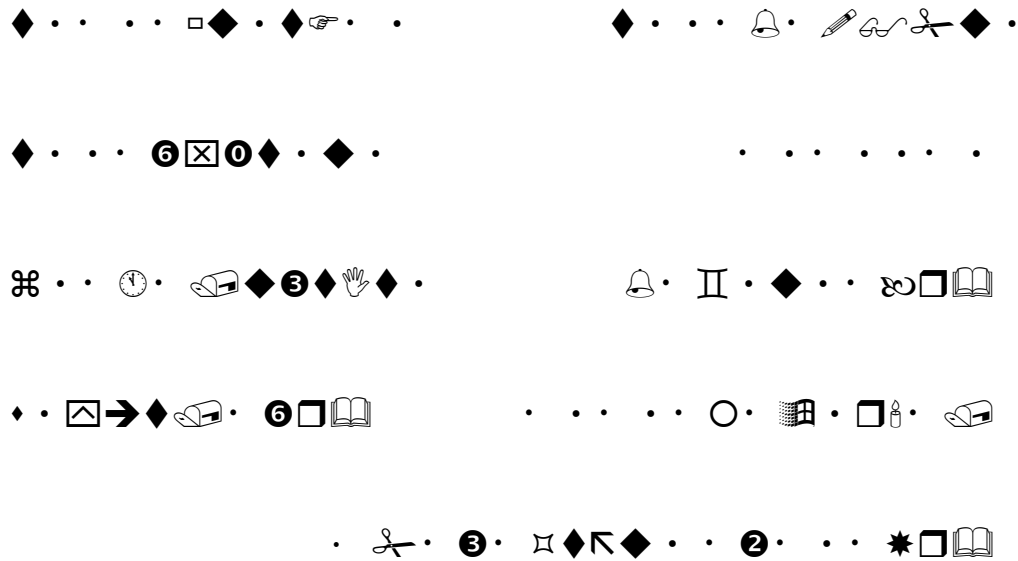
²⁵ *Ibid* 21

²⁶ Muhammad Isma Wahyudi, *Fikih Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta : PT. LKs Printing Cemerlang, 2009) h. 124

²⁷ Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kusar , 2006), h 234

²⁸ Depag, *Op.cit*, h. 55

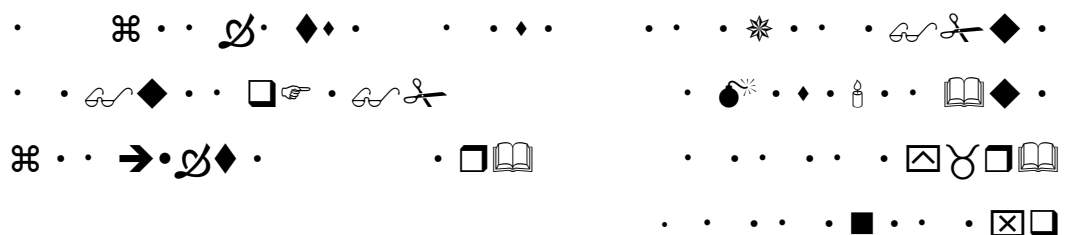
²⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h 18



Artinya : "Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari".³⁰

2) Bagi isteri yang sedang mengandung, *iddah*nya adalah sampai melahirkan.

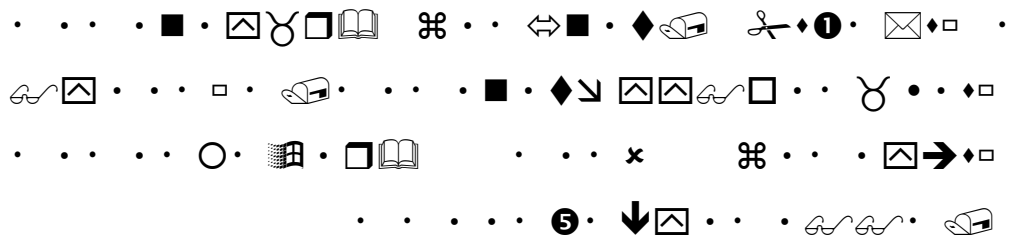
Dasarnya adalah surat at-Talaq ayat 4.



Artinya : "Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"

³⁰ Depag, *Opc.cit*, h. 57

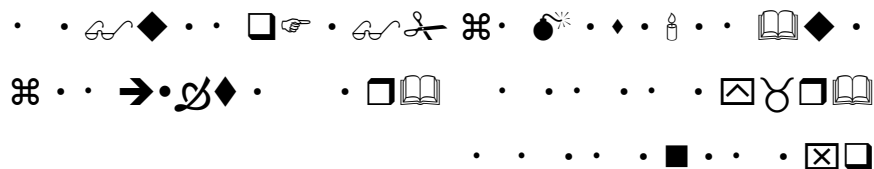
3) Bagi isteri yang belum disetubuhi (*qabla ad-dukhul*), maka dia tetap harus *iddah* seperti *iddahnya* isteri yang sudah disetubuhi³¹. Adapun dasar hukumnya adalah surat al-Baqarah ayat 234.



Artinya : "Kemudian apabila telah habis masa *iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut cara yang patut".

b. *iddah* talak (suami masih hidup)

1) Iddah wanita hamil hingga ia melahirkan berdasarkan firman Allah yang berbunyi :



Artinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008), h 423

Kalau yang dikandungnya itu lebih dari satu bayi, maka wanita tersebut tidak akan keluar dari iddahnya sampai dia melahirkan bayinya yang terakhir. Bagi Imam Hanafi batas maksimal kehamilan adalah 2 tahun.

- 2) *Iddah* tiga bulan *hilaliah* (berdasarkan perhitungan bulan), yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami *haidh* sama sekali, serta wanita yang mencapai masa *monopause*³²
- 3) *Iddah* tiga *quru* yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia Sembilan tahun, tidak hamil, bukan *monopause* dan telah mengalami *haidh*.

Dalam KHI, ketentuan *iddah* karena kematian diatur dalam pasal 153 poin a dan poin d yang berbunyi : "waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : a. apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan"³³

Untuk *iddah* karena perceraian, KHI menentukan 3 kali suci atau sekurangnya 90 hari bagi yang masih haid, dan bagi yang sudah tidak haid 90 hari. Namun apabila hamil, maka masa tunggu adalah sampai

³² Muhammad jawud, *Op.cit.* h 466

³³ Arkola, *op.cit.* h 217

melahirkan. Dan jika *qabla ad-dukhul*, maka tidak dikenakan *iddah*.³⁴

Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam fikih klasik.

III. Hikmah *iddah*

Tujuan disyari'atkannya *iddah* adalah :³⁵

- a. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas sehingga mengakibatkan rumah tangga putus. Jika pikiran sudah jernih, maka diharapkan suami mau merujuk isterinya.
- b. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, maka *iddah* ini ditetapkan karena untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya.
- c. Untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seorang isteri, sehingga tidak terjadi percampuran keturunan.
- d. Faktor *ta'abudiyah* kepada Allah.

D. Ketentuan Nafkah *Iddah* Talak Ba'in Dalam Ketentuan Hukum Islam

Salah satu sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam Islam adalah ijtihad para pemikir agama. Dalam Islam, banyak sekali ulama yang berkompeten dalam bidangnya. Ada ulama tafsir, hadis, fikih, sastra, sejarah, dan politik. Tanpa mengesampingkan bidang ilmu yang lain, namun hanya beberapa bidang saja yang selalu menarik untuk didiskusikan, dipelajari, dan dipahami. Yaitu ilmu

³⁴ *Ibid*, h 218

³⁵ Al-Jaziriy, Juz II, *Op.cit.*, h 465

Akan tetapi jika tidak hamil, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Mazhab Anas bin Malik juga menganut paham ini, yaitu isteri hanya berhak atas tempat tinggal. Dan menurut mazhab ini, tempat tinggal yang diberikan adalah sebagaimana sebelum isteri tersebut ditalak. Karena hak tersebut adalah hak yang tidak bisa digugurkan oleh siapa pun. Namun bila isteri hamil, maka dia berhak atas nafkah.

Namun apabila isteri tersebut hamil dan dia keguguran, bagaimana hukum nafkahnya?, apakah langsung terputus atau masih mendapatkan nafkah?. Dalam permasalahan ini, mazhab Anas bin Malik berpendapat bahwa jika kematian janin tersebut sudah diketahui, maka nafkah isteri tersebut putus saat itu juga. Karena hak atas nafkah adalah janin tersebut, bukan ibunya. Namun ada yang mengatakan bahwa nafkahnya terus diberikan sampai janin tersebut keluar menjadi mayat. Dari golongan sahabat, yang sesuai dengan pendapat ini adalah Aisyah Ummu al-Mukminin.

Sedangkan mazhab Hanabillah dalam permasalahan ini (nafkah *iddah* talak ba'in), tidak memberikan isteri apapun, baik nafkah, maskan, atau kiswah. Hal ini didasarkan hadits yang diriwayatkan Fatimah binti Qais yang berbunyi :³⁸

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنًى وَلَا نَفَقَةً (رواه مسلم)

³⁷ Depag, *loc.cit*, h. 946

³⁸ Ibnu Qudamah, *Op.cit*, h. 132

Artinya : "Suamiku mentalakku tiga kali pada masa Rasulullah SAW, lalu aku datang menemui Nabi SAW, maka Beliau tidak menetapkan tempat tinggal dan tidak juga nafkah bagiku"

Juga ada riwayat yang berbeda :³⁹

انما السكنى و النفقة لمن لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah diperuntukkan bagi isteri seorang suami yang masih bisa merujuknya"

Namun menurut beberapa ulama menjelaskan bahwa riwayat ini ditentang oleh Umar bin Khattab. Karena Umar tidak menerima riwayat dari seorang perempuan yang tidak diketahui kebenaran perkataan atau kuat tidaknya ingatan.

Namun Ahmad bin Hanbal dan Dar al-Qutniy menolak riwayat tentang perkataan Umar ini. Selain itu, logika pikir yang dijadikan pedoman Hanabillah adalah bahwa nafkah itu wajib diberikan ketika masih ada kemungkinan untuk digauli sebagaimana seorang isteri, sehingga wanita yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah. Karena itu, isteri yang ditalak ba'in juga tidak berhak atas nafkah, karena suami sudah tidak ada kemungkinan untuk menggaulinya selayaknya seorang isteri.

Pendapat Hanabilah ini merupakan pendapat dari Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Jabir, Atha', Ikrimah, Daud dan para sahabat ahli hadits.⁴⁰ Dari semua

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut : Darul Fikri, 2002) juz II, h. 409

pendapat di atas, jika kita komparasikan ke KHI, maka pendapat mazhab yang diakomodasi oleh KHI adalah pendapat dari golongan Hanabillah. Yaitu tidak memberikan apapun kepada wanita yang sedang menjalani masa *iddah* talak ba'in serta dalam keadaan tidak hamil.

⁴⁰ *Ibid, h. 409*


























BAB IV

PEMBAHASAN

A. Nafkah istri Dalam *Iddah* Talak Ba'in Menurut Abu Hanifah

Kewajiban nafkah dari seorang suami tidak hanya diberikan sewaktu istri menjadi istri sahnyanya dan terhadap anak-anak dan istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian ada beberapa orang yang salah melakukannya istri dan membuatnya sengsara setelah talak pertama dan ketika ia menjalani masa *iddah*. Hal ini tidak dibolehkan dia harus diberikan nafkah yang seimbang sesuai dengan standar hidup si suami¹.

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Nafkah akan istri ditetapkan dalam Al-Qur'an al-Baqarah 233

. . .   . . .    .   .  .    .
   . . .  .   . 
  .    .    . 

Artinya : Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (al-Baqarah 233)

Dalam ayat diatas, kata "*rizq*" meliputi kecukupan pangan, pakaian, yang memadai, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ayat tersebut secara khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, sehingga orang-orang yang egois tak mungkin menggunakan tanggung jawab terhadap anak sebagai alasan untuk

¹ Muhammad jawud, *Op.cit*, h 400

menekan aspek lain, baik dari ibu atau ayah. Ayah dan ibu harus memutuskan semua kesepakatan untuk memelihara sianak dengan cara musyawarah.

Juga berdasarkan hadist

حق المرأة على زوجها ان يشبع بطنها , ويكشو جنبها و ان جهلت غفر لها

Artinya : Hak seorang wanita dari suaminya adalah dikenyangkan perutnya, dan ditutupi badannya (diberi pakaian) kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu dia di ampuni

Bagi mazhab Hanafi sebagaimana telah di uraikan dalam kitab *Durr al-Mukhtar*, istri diberlakukan sebagai pangkal (*ashl*) sedangkan anak sebagai cabanag (*furu*) dalam menetapkan prioritas nafkah meskipun keduanya tidak serumah dan menurut semua ulama mazhab wajib hukumnya menafkahkan mereka.

Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam hal talak bagi yang *khalwat* dengan istri tanpa melakukan percampuran meyebabkan adanya kewajiban *iddah*. hanafi mengatakan *Khalwat* itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban *iddah* bagi si wanita dan kebolehan rujuk bagi si laki-laki..

Secara garis besar, Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri yang sedang menjalankan *iddah thalak ba'in* tetaplah mendapatkan hak-haknya sebagaimana *thalak raj'i*. Karena dalam hal ini Abu Hanifah tidak membedakan. Begitu juga apakah isteri dalam keadaan hamil atau tidak.

Adapun dasar dari Abu Hanifah adalah keumuman dari surat at-Talaq ayat 7 yang berbunyi :

• • • • • • •    • • • • • ① • • • • •  • • • • •
 • • • • •    

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya"²

Menurut Abu Hanifah, maksud yang dicakup dalam ayat tersebut masihlah umum, baik dalam permasalahan *thalak ba'in* maupun *raj'i*. Karena ketentuan umum dalam al-Quran tidak bisa digugurkan selama masih belum ada pengkhususan yang pasti. Dan pengkhususan ayat ini ternyata tidak dijumpai dalam al-Quran.³

Selain ayat tersebut, ada beberapa dasar yang dipakai Abu Hanifah. *Pertama*, berpedoman pada surat at-Talaq ayat 6 yang berbunyi :

• • • • • ⑥   •  •  • • • • •
 • • • • • •  •    • • • • • •  •  • •

Artinya : "Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mempersempitkan (hati) mereka".⁴

Isteri yang ditalak *ba'in* mempunyai hak akan tempat tinggal, sehingga otomatis dia juga dapat nafkah sebagaimana *thalak raj'i*. *Ketiga*, karena status

² Depag RI, *Op.cit*, h. 946

³ Abu Zahrah, *Op.cit*, h. 450

⁴ Depag, *Op.cit*, h. 946

wanita tersebut sedang "dikekang" beberapa haknya, maka dia juga berhak atas nafkah dari suami sebagaimana sebelum bercerai.⁵

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila wanita yang beriddah tersebut dalam keadaan talak *raj'i* dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia ketika ia menjalani iddah-nya, maka iddah-nya beralih ke iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah terputus, kecuali jika siwanita itu diminta untuk menjadikan nafkahnya sebagai hutang atas suami yang betul-betul dilaksanakannya dalam kondisi seperti ini nafkahnya tidak gugur.

Dalam kitab *al-Mabsuth* di nyatakan bahwa setiap istri yang di talak tiga atau satu berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. Adapun talak *raj'i* karena dia masih berada di rumahnya sebagaimana sebelumnya. Sesungguhnya nikah itu akan berakhir setelah selesai masa iddah-nya dan itu tidak menggugurkan nafkah sebagaimana perlindungan atasnya atau dihubungkan dengan perceraian berlalu satu bulan. Adapun talak *ba'in* istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah-nya⁶.

Abu Hanifah berpendapat istri berhak mendapatkan nafkah sekalipun dia di talak tiga, hamil ataupun tidak hamil tetapi dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalani masa iddah. Hukum wanita ber iddah akibat fasakh akad menurut hanafi sesuai dengan wanita yang di talak *ba'in*⁷.

⁵ Ali as-Sabuniy, *Op.cit*, h. 435

⁶ Asy-Syarakshi, *Op.cit*, h 201

⁷ Muhammad jawud, *Op.cit*, h 401

B. Landasan Pemikiran Abu Hanifah dan Metode *Ijtihad* Hukum Abu Hanifah tentang nafkah istri dalam iddah talak ba'in

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedang di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadis, sehingga Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan *al-ra'y*.

Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah yang baru, yang belum terdapat dalam al-Quran dan Hadis, dan menganjurkan pembahas persoalan dengan bebas merdeka, ia banyak mengandalkan *qiyas*, dan juga berdasarkan *istihsan* dan *istishab* dalam menentukan hukum.⁸

Pengangkatan Abu Yusuf menjadi *qadi* pada masa *Daulah Abbasiyah* merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para *qadi* sesudah dari ulama Hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama penyebaran mazhab Hanafi di Irak. Pertama kali dan kemudian di seluruh dunia Islam kala itu, seperti Persia, Suriah dan Mesir serta Maghribi lainnya.⁹

Dalam metode *istidlal* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, “*Sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Quran dalam menetapkan*

⁸ Dahlan, Abdul Azis, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 13

⁹ *Ibid*, h. 513

hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Quran, maka saya mengambil Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qat'iy dari al-Quran atau dari hadis yang diragukan kesahihannya, karena Kufah terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul SAW. Ia selalu menggunakan ra'yu dan sangat selektif dalam menerima hadis.

Adapun secara hirarkis pokok-pokok pemikiran Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah merupakan pilar utama syariat, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung *ijaz* dengan satu surat darinya dan mempunyai nilai ibadah jika membacanya.¹¹

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah memposisikan al-Quran sebagai sumber hukum pertama sebagai rujukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa

¹⁰ Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 86

¹¹ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Gayatu al-Ushul Syarh Lubbi al-Ushul*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h, 33

memiliki kewajiban selama masa iddahnya dan seperti itu juga ditetapkan adanya hak nafkah dengan kekuasaan yang di miliki.

Hukum khas mencapai yang makhshush adalah qathi tanpa perlu kepada bayan. Maka karenanya khashul Qur'an qarhi dalalahnya. Segala naskh yang di pandang hukumnya adalah nasikh dan nasikh harus sama kuatnya dari segi taubatnya. Dan 'aam sama dengan kash, qathi dalalahnya kepada umum baik 'aam Al-Qur'an ataupun aam sunnah. Demikian menurut pendirian ulama hanaiah hal ini di takrijkan dari hokum furu oleh Abu Hanifah sendiri.

b. *Al-Sunnah*

Al-Sunnah atau hadis adalah beberapa perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi terhadap suatu perbuatan yang beliau saksikan. Dimana hadis berfungsi sebagai penjelasan *al-kitab*, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada *al-sunnah* tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.

Dasar yang kedua yang digunakan Abu Hanifah adalah As-Sunnah. Ulama hanafiyah menetapkan bahwasesuatu yang di tetapkan dengan Al-Qur'an yang qathi dalalahnya dinamakan fardlu, sesuatu yang di tetapkan oleh as-sunnah yang dhanny dalalahnya dinamakan wajib. Demikian halnya tiap yang di larang oleh Al-Qur'an haram dan tiap yang dilarang oleh as-sunnah dinamakan *makruh tahrim*.

Dalam permasalahan nafkah istri dalam iddah talak ba'in para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak diberikan nafkah dan tempat tinggal berdasarkan dalil hadis Fatimah binti Qais :

حسن بن علي الحو نى حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن ابن صاح عن السدى عن البى
فاطمه بنت قيس قالت طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل لى رسول الله صلى عليه وسلم
عن
سكنى و لانفقة

Artinya : Dari Hasan bin Ali al-hilwan telah bercerita kepada kami Yahya bin Adam telah bercerita kepada saya Hasan bin Salih dari Sadyih dari al-Baliy dari Fatimah binti Qais berkata : saya di talak tiga oleh suami saya, maka Rasulullah SAW meniadakan tempat tinggal dan nafkah “ (HR. Muslim)

Hanya saja sesungguhnya dalam hadis ini ada pembicaraan sesungguhnya bahwa suami Fatimah binti Qais yang bernama Usamah bin Zaid apabila ia mendengarkan hadist ini, dia melemparkan sesuatu yang ada ditangannya. Dari Aisyah Ra dia berkata: “Sesungguhnya perempuan itu memfitnah orang lain”.

Maksud dengan periwayatan hadis ini Umar bin Khattab berkata kami tidak meninggalkan al-Qur'an dan hadis hanya karena ucapannya seorang perempuan, yang kami tidak mengetahui, apakah ia benar atau berdusta, kuat hafalannya atau pelupa. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata ; Istri yang ditalak tiga mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*.

Pemahaman hadist ini bisa dilihat dari dua bentuk :

1. Suaminya sedang tidak ada, pergi ke Yaman. Ia mewakili saudaranya memberikan nafkah kepada istrinya berupa gandum, kemudian dia enggan dengan itu dan suaminya setelah ada tidaknya lagi memberikannya yang lain.

2. Sesungguhnya pembicaraan sangat buruk berdasarkan apa yang disampaikan, sesungguhnya ia disakiti oleh suaminya sampai mereka mengusirnya dan Rasulullah memerintahkannya untuk melalui masa *iddahnya* di rumah ibn Ummi al-maktum. Lalu ia menyebutkan bahwa ia tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Di dalam kitab *Al-atsar* karangan Abu Yusuf dan *Al-Atsar* karangan Ibnul hasan di riwayatkan hadist yang diriwayatkan Abu Hanifah dalam penerimaan hadist sangat berhati-hati. Hadist yang di terima Abu Hanifah adalah mutawatir mansyur dan juga hadist ahad namun Abu hanifah sangat keras dalam menetapkan syarat untuk di terimanya hadist *ahad* beliau mendahulukan perawi yanh *afqah* atas hadit yang diriwayatkan oleh parawi yang tidak *afqah*.

Sehingga dalam masalah nafkah ini Abu Hanifah tidak memakai hadist Fatimah binti Qais karena hadist ini banyak di perselisihkan ke shahihannya sehingga beliau tidak memakainya dan kembali ke pada keumuman ayat Al-Qur'an.

c. *Aqwal Al-Sahabah*

Aqwal Al-Sahabah atau fatwa sahabat beliau jadikan sumber hukum karena para sahabat merupakan penyampai risalah, menyaksikan masa turunnya al-Quran serta mengetahui *munasabah* keserasian antara ayat-ayat al-Quran dan hadis serta pewaris ilmu dari Nabi SAW untuk generasi berikutnya. Menurut mayoritas ulama, *Aqwal Al-Sahabah* dijadikan sebagai *hujjah* setelah al-Quran dan hadis.¹³

¹³ Abu Zahrah, *loc.cit*, h. 215

Imam Abu Hanifah ketika tidak menemukan sumber hukum dalam kitab Allah, maka beliau mengambil fatwa para sahabat Nabi dengan mengambil pendapat mereka yang dikehendaki dan meninggalkan mereka yang tidak dikehendakinya, dan tidak keluar dari pendapat mereka.¹⁴

d. *Qiyas*

Imam Abu Hanifah mengemukakan, jika tidak ditemukannya *nas* dari ketiga sumber diatas, maka beliau menggunakan jalur *qiyas*. Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah penyetaraan hukum sebuah masalah yang tidak ada *nasnya* dengan masalah lain yang ada *nasnya* dengan syarat bahwa terdapat persamaan '*illat*'¹⁵ diantara kedua masalah itu.¹⁶

e. *Istihsan*

Yang dimaksud dengan *istihsan* adalah keluar atau menyimpangnya seorang mujtahid untuk memberikan hukum dalam suatu masalah yang hukumnya sama dengan masalah yang pertama karena ada alasan yang lebih kuat dari yang pertama.¹⁷ "Misal, seorang mewakafkan tanah, jika telah mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk di dalam wakaf itu hak pengairan, air minum, hak keluar dengan sanksi ringan yang tidak disebutkan berdasarkan *istihsan*. Karena diqiyaskan kepada sewa-menyewa. Hal ini didasarkan pada manfaat tujuan wakaf tersebut, sekalipun tidak secara jelas disebut pada waktu memberikan wakaf.

¹⁴ *Ibid*, h. 215

¹⁵ *Illat* adalah sifat yang menggabungkan antara perkara yang sudah jelas hukumnya terhadap sesuatu yang belum jelas hukumnya.

¹⁶ *Ibid*, h. 218

¹⁷ Abu Zahrah, *Op.cit*, h. 262

Tetapi menurut *qiyas jali*, hal-hal tersebut tidak termasuk di dalam wakaf, kecuali jika terdapat *nas*.

f. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.¹⁸ Kesepakatan para ulama ini merupakan *hujjah* dan kedudukannya setelah nas al-Quran dan Hadis serta merupakan penguat dari keduanya, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang adanya *ijma'* setelah sahabat. Dalam hal *ijma'*, Imam Abu Hanifah sangat fanatik terhadap pendapat ulama-ulama terdahulu wilayah beliau yaitu Kufah. Dalam Hal Nafkah istri yang di talak ba'in ini Imam Abu Hanifah tidak memakai Ijm.

g. *'Urf*,

'Urf yaitu adat-istiadat orang-orang Islam dalam suatu masa tertentu yang tidak disebut dalam *nas* al-Quran, hadis atau belum ada praktek sahabat. *'Urf* sendiri ada dua macam, yakni *'urf sahih* dan *'urf fasid*.¹⁹

Metode Ijtihad Abu Hanifah Yang Bersifat Tambahan

1. Dilalah lafadz *'am* adalah *qath'i*, seperti lafadz *khash*
2. Pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus
3. Banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*)
4. Adanya penolakan terhadap *mafhum* (makna tersirat) syarat dan sifat

¹⁸ Abi Zakariya al-Anshari, *Op.cit*, h, 107

¹⁹ *Ibid* h. 189

5. Apabila perbuatan *rawi* menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya bukan riwayatnya
6. Mendahulukan *qiyas jali* atas *khobar ahad* yang dipertentangkan
7. Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan *qiyas* apabila diperlukan.

Contoh Pendapat Abu Hanifah:

1. Dalam hal istri yang di thalak ba'in baik hamil atau tidak hamil tetap diberikan nafkah selama masa iddahnya. Karena istri yang di thalak ba'in tetap dalam masa ikatan rangkaian perkawinan yakni masa iddah sehingga si istri tetap di berikan nfkah dan tempat tinggal. Eperti yang telah dijelaskan bahwa Abu Hanifah memakai keumuman ayat dari pada hasit yang di perselisihkan ke shahihhannya.
2. Benda wakaf masih tetap milik *wakif*. Kedudukan wakaf dipandang sama dengan '*ariyah* (pinjam meminjam). Karena masih tetap milik *wakif*, maka benda wakaf dapat dijual, diwariskan dan dihibahkan oleh *wakif* kepada yang lain, kecuali wakaf untuk mesjid, wakaf yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim, wakaf wasiat, dan wakaf yang diikrarkan secara tegas bahwa wakaf itu terus dilanjutkan meskipun *wakif* telah meninggal dunia. (*Istihsan*)
3. Perempuan boleh menjadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya, karena perempuan tidak dibolehkan menjadi saksi pidana, perempuan hanya dibenarkan menjadi saksi perkara perdata. Karena itu menurutnya perempuan hanya boleh jadi hakim yang menangani perkara perdata.

Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakannya adalah *qiyas* dengan menjadikan kesaksian sebagai *ashl* dan menjadikan hakim sebagai *far'*.

C. Analisis

Satu tema utama atau prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaribawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat bagi perempuan.

Islam berbicara tentang pria dan wanita dan memperlakukan mereka “hampir sama”. Di antara hal yang sama sekali tidak perlu ddiragukan kaum perempuan dalam prespektif Islam ialah bahwa syariat Islam tidak menyamakan secara mutlak antara laki-laki di satu pihak dan perempuan di pihak lain.

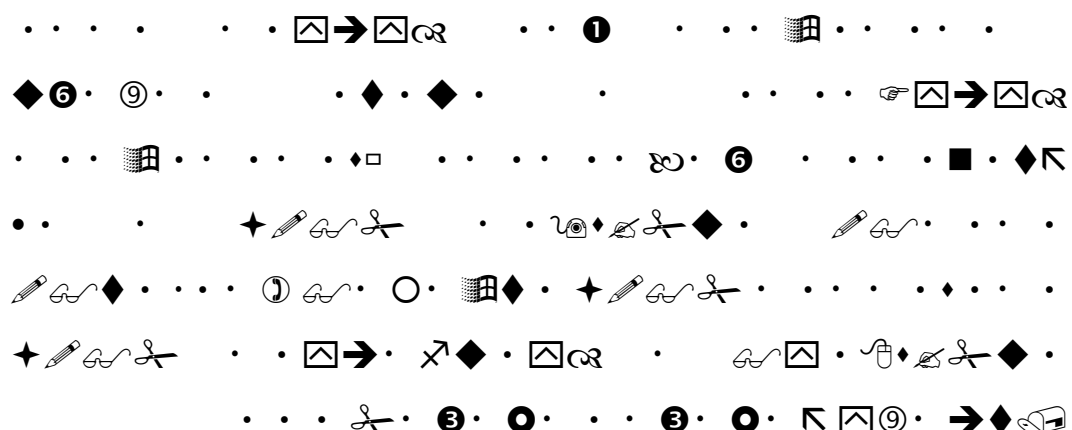
Wanita pada umumnya adalah merupakan jenis manusia yang paling banyak memerlukan perlindungan pada masa lalu dikala pria menggunakan hak cerai secara bebas maka wanita yang banyak mengalami penderitaan. Akibat perceraian semacam ini bukan saja pukulan moral bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya. Ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang nafkah untuk anak-anaknya yang sebenarnya adalah tanggung jawabnya

mantan suami. Untuk itulah Islam datang dengan membawa keadilan dan mengangkat derajat wanita dalam Islam²⁰.

Di dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami istri. Hal ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak agar tercipta keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Salah satu bagaian yang terpenting adalah masalah nafkah dalam perkawinan. Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban materi yang bukan berupa kebendaan.

Kewajiban materi yang bukan kebendaan yakni, *pertama* sesuai dengan penghasilannya suami mempunyai kewajiban terhadap istri memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. *Kedua*, biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. *Ketiga*, pendidikan anak.

Pertama kali yang diwajibkan suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya. Maka diwajibkan kepada suami memberikan nafkah kepada istrinya berupa pakaian, makanan dan hal lainnya yang berupa maslahat baginya, Allah berfirman :



²⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT. Rajagrafindo persada, 2004), h. 187

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu ia menjadi istrinya dan terhadap anak-anak dari istrinya itu, suami itu menafkahi juga pada saat perceraian. Ulama sepakat dalam hal istri yang *iddah* karena talak *raj'i* baik hamil atau tidak hamil diberikan nafkah dan tempat tinggal. Namun, mereka berbeda pendapat akan hal nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in*.

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini, ada baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perbedaan para ulama dalam membahas dalam kajian ini agar memperoleh pemahaman yang jelas akan masalah ini.











Salah satu yang menjadi perbedaan dalam menentukan hak nafkah bagi istri dalam *iddah* talak *ba'in* adalah dalam pengambilan dan pemahaman redaksi ayat Al-Qur'an dan Hadist. Imam Ahmad mengatakan bahwa istri yang dalam masa *iddah* talak *ba'in* tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal berdasarkan hadist Fatimah binti Qais.







Imam Syafi'i dan Imam Malik satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa istri dalam *iddah* talak *ba'in* berhak mendapatkan tempat tinggal tanpa nafkah dengan dalil Firman Allah at-Thalak ayat 6







Menurut Imam Abu Hanifah yakni menghubungkan hukum dengan syarat²¹, tidak menunjukkan keadaan hukum tidak ada syarat karena *mafhum nash* bukan *hujjah* karena itu bisa saja hukum itu tetap tanpa adanya syarat dengan *illat* yang lain seperti “ seorang tuan yang berkata kepada hambanya engkau merdeka ketika bulan ini telah selesai, kemudian dia berkata engkau merdeka besok pagi”. Hubungan itu benar jika ia menghilangkan kehambaannya pada hari ini, maka berlalulah besok, kemudian dia membatalkannya berlalu satu bulan dia memerdekakanaya walaupun masih tetap kepemilikannya besok pagi dia tetap merdeka juga.

Abu Hanifah sebagai ulama besar yang merupakan imam *ahlul ray’u* dalam menghadapi al-Qur’an dan as-Sunnah ia berusaha menangkap pesan dari *nash* maka ia terkenal ahli dibidang *ta’lil* dan *qiyas*. Dari pendiriannya ia memunculkan teori *istihsan*.

Demikian halnya dengan masalah nafkah isrti dalam *iddah* talak *ba’in* ini. Imam Abu Hanifah memandang dalam ayat al-Qur’an

• •  •  •  • • • •  •  •  • •  •  •  •  •

• • • •  •  • •  • •  • • • • •  • 

• • • • •  •  •  •  •  • 

²¹ Dilalah syarah atau disebut juga isyarah al-nash yaitu al- syarahisi mengatakan apa “ yang terungkap memeng bukan di tunjukkan untuk itu, namun dari perhatian yang emndalam ditemukan suatu makna dari lafaz itu, tidak lebih dan tidak kurang”

Bahwa lafaz yang diungkapkan meberi suatu maksud namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu. Lafaznya menunjukkan pada suatu arti tertentu. Ulama ushul menagkap lafaz tersebut dan member petunjuk (syarat) dalam hal tertentu. Amir syarifuddin, *Ushul fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 132

Aerinya : kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Menurut Abu Hanifah di pandang sebagai *dilalah nash*. *Dilalah nash* sering juga disebut dengan *qiyas jalil* penunjukkan *dilalah nash* terjai apabila suatu *nash* menurut “ibarat” menunjuk suatu hukum terhadap suatu kejadian.

Sehingga dalam hal ini Abu Hanifah lebih memandang indeks ayat at-Thalak ayat 6 ini pada pandangan umum karena untuk menerima hadist, Abu Hanifah sangat berhati-hati tidak setiap hadist diterima sebagai sumber syariat Islam, ia tidak menerima berita dari Rasulullah kecuali berita yang diriwayatkan oleh jamaah atau berita yang di sepakati oleh *fuqaha'* suatu negeri dan diamalkan atau berita ahad yang di riwayatkan sahabat dalam jumlah banyak (tetapi tidak mutawatir) yang tidak dipertentangkan²².

Hal inilah yang menyebabkan pandangan Abu Hanifah akan Hadist Fatimah binti Qais tidak diakuinya karena dia tidak sembarangan dalam menilai keshahihan hadist dalam penolakannya akan hadist ia berkata :


“ *Penolakan saya akan seseorang yang bercerita tentang berita tentang Nabi selain al-Qur'an bukan dimaksudkan menolak Nabi bukan pula mendustakan Nabi,. Tetapi penolakan atas orang yang membawa berita bohong atas nama Nabi*”

Dapat di analisis oleh penulis bahwa nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in* harus diberikan kepada si istri dan merupakan kewajiban suami. Karena *iddah*

²² M. Zuhri, *Op.cit*, h. 93

merupakan rangkaian dalam pernikahan walupun tidak dapat di rujuk lagi oleh suami, namun *iddah* istri dalam talak *ba'in* merupakan jalannya pernikahan

Penulis setuju dengan pemikiran Abu Hanifah dalam hal nafkah istri dalam iddah talak *ba'in* ini karena pada dasarnya nafkah wajib diberikan suami kepada istri walaupun telah bercerai.

Pada surat at-Talak ayat 6 kata dalam pengganti nama . . . yakni mereka perempuan pada kalimat  ini menunjukkan kepada semua wanita yang di cerai yang telah di bicarakan sejak ayat 1 auarat at-thalak.

Kata mereka adalah *ism maushul* yang merupakan perambungan dari sebelumnya Dengan demikian kata mereka mencakup semua istri yang diceraikan baik yang boleh rujuk, yang hamil maupun perceraian *ba'in* hamil ataupun tidak hamil, sehingga berhak atasnya nafkah dan tempat tinggal.

Adapun menurut *ijma'* para ulama adalah Ibnu Qudamah berkata “para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali jika si istri tersebut durhaka²³”.

Adapun seseorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila memenuhi syarat-syarat secara garis besar adalah:

- Dalam ikatan perkawinan yang sah
- Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- Suaminya dapat menikmati dirinya

²³ Slamet Abidin, *Op.cit*, h. 186

- Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, kecuali suami bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah dan membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
- Keduanya saling dapat menikmati

Di dalam kaidah fikih di jelaskan:

لا حق للزوج على زوجته إلا في حدود يمسى للزوج ولا حق للزوجة على زوجها إلا في حدود أوامر الشرع فيما يمسى الزوج

Artinya : Tidak ada hak suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan²⁴.

Kaidah ini menggambarkan keseimbangan antara kedudukan suami istri yang ma dalam subjek hukum yang penuh. Apabila seorang suami atau istri memberi hibah seseorang tidak dapat ikut campur dan tidak bisa menarik hibah tersebut setelah di serahkan.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya maka ia bertanggung jawab membelanjakannya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Berdasarkan kaidah ini maka Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri.

Jika suami *bakhil* tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya

²⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 123

untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa pengetahuan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya, apabila suami melalaikan kewajibannya. Bagi orang yang mempunyai hak, ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, dengan alasan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i yakni menyatakan :

عن عائشة ر.ع. ان هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ص.م. ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم, قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya : Dari Aisyah ra. Sesungguhnya Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah seseorang yang kikir. Ia tidak mau memberikan nafkah kepadaku, sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya”. Maka Rasulullah SAW bersabda ”Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik”. (HR. ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i)²⁵

Namun dikarenakan syarat gugurnya nafkah istri dalam *issah talak ba'in* menurut imam Abu Hanifah apabila istri keluar dari tempat tinggal yang telah diberikan oleh suami dalam hal ini penulis juga sependapat dengan Abu Hanifah namun diberikan syarat apabila ada izin dari suami istri boleh keluar dari rumah karena dapatnya izin dari suami yang memberikan nafkah *iddah* tidak dinamakan *durhaka* atau *nusyuz*.

Seperti telah ditegaskan dalam firman Allah SWT :

²⁵ Slamet Abidin, *Op.cit*, h.167

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang pemikiran Abu Hanifah tentang nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Abu Hanifah berpendapat nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in*, wajib diberikan kepada istri baik ia hamil maupun tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalani masa *iddah*-nya.
2. Dalam masalah nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in* ini, langkah *ijtihad* yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau mengambil keumuman ayat al-Qur'an

B. Saran-Saran

1. Dalam memahami masalah nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in* hendaknya tidak dipahami secara *parsial* sehingga pemahaman yang muncul sesuai dengan cita-cita syari'ah untuk mewujudkan masalah di tengah-tengah manusia dapat dirasakan.
2. Adapun pendapat yang menarik dari Imam Abu Hanifah adalah dimana beliau memberikan keringanan kepada para istri yang di talak walaupun talak *raj'i* dan *ba'in* untuk mendapatkan nafkah dikarenakan bukanya

berat apabila seorang istri itu telah di cerai lalu tidak diberikan nafkah sedangkan dia adalah makhluk yang lemah. Dengan pendapat ini hendaklah menyadari bahwa wanita juga memerlukan perlindungan walaupun mereka tidak menjadi istrinya lagi.

3. Penelitian berkaitan dengan nafkah istri dalam *iddah* talak *ba'in* sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Abu Hanifah, studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selamat, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia,1999)
- Abu Yusuf Ya'kub, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Laila*, (Mesir : Mathba'ah al-Wafa', t.th)
- Ahmad Farid, Syaikh, *60 Biografi Ulama Salaf* : (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008)
- Al-Ansyari, Abu Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahab*, (Semarang,: Toha Putra, t.th)
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Ialam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo persada, 2008)
- Ash-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007) Jilid III
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, (PT.Bina ilmu: Surabaya, 2003)
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008)
- Azhim, Abdul, *Al-Wajiz*, (Jakarta : as-sunnah, 2008)
- Daud, Abi, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth)
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982)
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Ghofar, Abdul, *Fikih Keluarga*, (Pustala Al-Kautsar : Jakarta, 2006)
- Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), cet. ke-4
- Isna Wahyudi, Muhammad, *Fikih Iddah Klasik dan Kontemporer*, (PT. LKS Printing Cemerlang : Yogyakarta, 2009)
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera : Jakarta, 2010)
- Manshur, Abd al-Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Zaman : Jakarta, 2009)

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XVI (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002)
- Muhammad bin Ahmad, *Fthurrahi, alafiqh al-Imam Malik al-adallh*, Juz II (Beirut : Dar al-Fikr, 1979),
- Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Fikr, tth)
- NA.Baiquni, I.A Syawaqi, R.A. Azis, *Kamus Istilah Agama Islam*, (Surabaya : Indah, 1996)
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004)
- Praja, Juhaya, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003),
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, juz 6 (t.tp : Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyah, t.th)
- Rahman, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH Apik, 2005)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, (Beirut : Darul Fikri, 2002) juz II
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. V (Bandung: Tarsito, 1994)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2008)
- sy-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, (Libanon : Darul Kitab al-Ilmiah, 1993), Juz V
- Zuhri, Muh, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1997)